

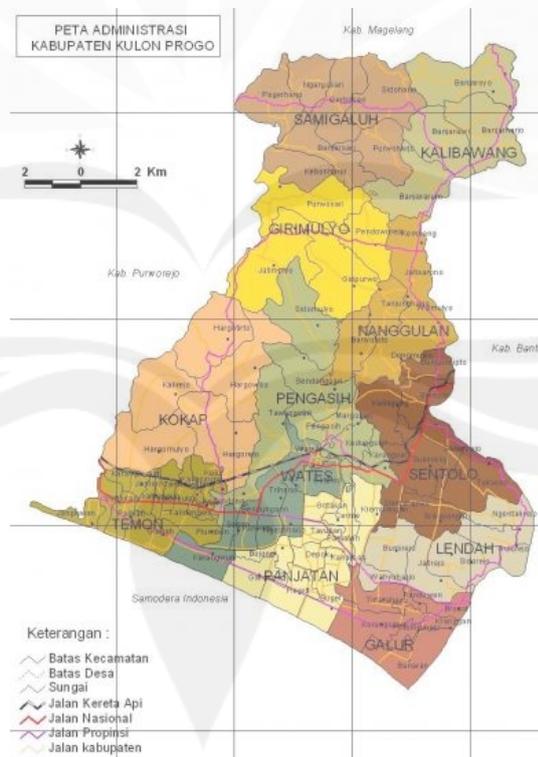
## BAB III

### TINJAUAN LOKASI

#### 3.1 Tinjauan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai Wilayah Sasaran Proyek

##### 3.1.1 Kondisi Administratif Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas administratif Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates, terdiri dari 12 kecamatan 87 desa, 1 kelurahan dan 917 dukuh.



**Gambar 3. 1** Peta Wilayah Kabupaten Kulon progo

Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/> diunduh pada September 2014

Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yaitu Kecamatan Kokap, Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, Kecamatan Wates.

### **3.1.2 Kondisi Geografis, Topografis, dan Klimatologis Kabupaten Kulon Progo**

Secara geografis Kabupaten Kulon Progo memiliki batas wilayah yaitu batas barat 110 derajat Bujur Timur 1' 37", batas timur 110 derajat Bujur Timur 16' 26", batas utara 7 derajat Lintang Selatan 38' 42", batas selatan 7 derajat Lintang Selatan 59' 3". Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km<sup>2</sup>).

Hamparan wilayah Kabupaten Kulon Progo mencakup dataran rendah, dataran tinggi serta daerah perbukitan. Persentase luas tanah di Kabupaten Kulon Progo menurut ketinggiannya dari permukaan air laut adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan laut (dpal), 15,20 % berada pada ketinggian 8-25 m dpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26-100 m dpal, 33,0 % berada pada ketinggian 101-500 m dpal , dan 11,37 % berada pada ketinggian >500 m dpal.

Distribusi wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringannya adalah:

- 40,11 % berada pada kemiringan < 2°
- 18,70 % berada pada kemiringan 3°- 15°
- 22,46 % berada pada kemiringan 16° - 40°
- 18,73 % berada pada kemiringan > 40°

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi:

- Bagian Utara: Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 -1.000 meter dari permukaan laut. Meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.



**Gambar 3. 2 Contoh Topografi Wilayah Utara Kabupaten Kulon progo**

*Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/> diunduh pada Maret 2015*

- Bagian Tengah: Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 500 meter di atas permukaan air laut, Meliputi Kecamatan Sentolo, Pengasih, dan Kokap. Bagian ini merupakan wilayah dengan lereng antara 2-15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.



**Gambar 3. 3 Contoh Topografi Wilayah Tengah Kabupaten Kulon progo**

*Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/> diunduh pada Maret 2015*

- Bagian Selatan: Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut, Meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0-2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.



**Gambar 3. 4 Contoh Topografi Wilayah Selatan Kabupaten Kulon progo**

*Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/> diunduh pada Maret 2015*

Kabupaten Kulon Progo yang terletak antara Bukit Menoreh dan Samudera Hindia dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai Bogowonto dan Sungai Glagah di Bagian barat dan tengah. Sumber air baku di Kabupaten Kulon Progo meliputi, mata air Clereng, mata air Mudal, mata air Grembul, mata air Gua Upas, dan Waduk Sermo, dan Sungai Progo.

Berdasarkan letak lintangnya, Kabupaten Kulon Progo memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Selama tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo, rata-rata curah hujan perbulan adalah 187 mm dan hari hujan 14 hh per bulan. Keadaan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2013 sebesar 490 mm dengan jumlah hari hujan 22 hh sebulan. Kecamatan yang mempunyai rata-rata curah hujan per bulan tertinggi pada tahun 2013 berada di Kecamatan Lendah sebesar 366 mm dengan jumlah hari hujan 9 hh perbulan.

### 3.1.5 Kondisi Demografis Kabupaten Kulon Progo

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo bertambah dari tahun ke tahun, berdasarkan hasil Sensus Penduduk, dibandingkan dengan tahun 1980, penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2010 bertambah 8.814 jiwa sehingga berjumlah 388.869 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini berpengaruh pada kepadatan penduduk yang sebelumnya pada tahun 1980 berjumlah 649 jiwa/km<sup>2</sup> sekarang menjadi berjumlah 663 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 3. 1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
Temon	24.471	36,30	674
Wates	43.995	32,00	1.375
Panjatan	33.397	44,59	749

Galur	29.120	32,91	885
Lendah	36.447	35,59	1.024
Sentolo	44.525	52,65	845
Pengasih	45.175	61,67	732
Kokap	31.124	73,80	422
Girimulyo	21.893	54,90	399
Nanggulan	27.239	39,61	688
Kalibawang	26.802	52,96	506
Samigaluh	24.681	69,29	396
	<b>388.869</b>	<b>586,27</b>	<b>663</b>

Sumber: BPS Kulon Progo, 2014

### 3.1.6 Kondisi Sosio-Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan produktivitas yang masih rendah, Kabupaten Kulon Progo mulai meningkatkan investasi di wilayahnya dengan perencanaan pembangunan proyek-proyek strategis. Diantara rencana investasi strategis Kabupaten Kulon Progo adalah proyek pembangunan bandara internasional, proyek pembangunan pelabuhan perikanan, proyek pertambangan pasir besi, dan proyek pembangunan kawasan industri besar, menengah, dan kecil.

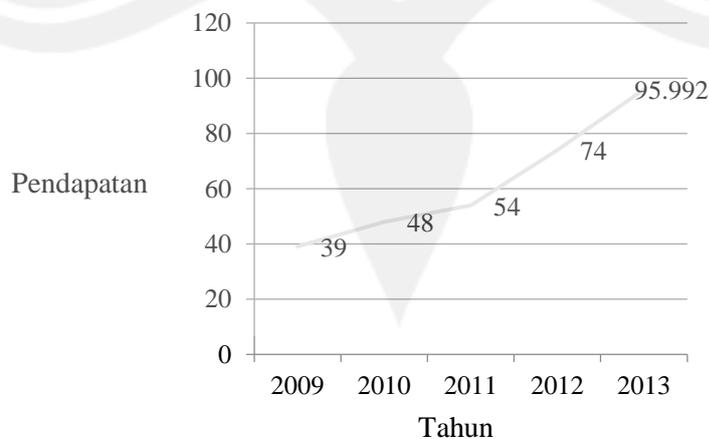
**Tabel 3. 2 Data Perkembangan Potensi Industri di Kabupaten Kulon Progo, 2009-2013**

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Unit Usaha	20.668	20.575	20.325	20.305	19.933
Tenaga Kerja	56.298	55.045	54.400	54.379	54.854
Nilai Investasi (juta rupiah)	50.217	64.950	65.341	65.882	66.535
Nilai Produksi (juta rupiah)	373.308	531.700	425.428	425.020	444.825

Sumber: BPS Kabupaten Kulon progo

Implikasi ekonomi dari proyek-proyek tersebut adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang juga akan memajukan pembangunan fisik di Kabupaten Kulon Progo (misal, perumahan, pertokoan, dan pusat bisnis).

**Tabel 3. 3 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2013 (dalam milyar rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Kulon progo

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan juga dengan adanya proyeksi pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo mengharuskan pemerintah kabupaten mengupayakan peningkatan pelayanan publik, salah satunya adalah fasilitas pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar peraturan pemerintah.

Untuk pelayanan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Kabupaten Kulon Progo memiliki Dinas Pemadam Kebakaran yang belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah.

Menurut data yang dilansir oleh BPS Yogyakarta, jumlah kebakaran yang terjadi di Kulon Progo sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2013 adalah 39 kejadian.

**Tabel 3. 4 Data Jumlah Kebakaran di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulon Progo
2011	91	35	42	22	11
2012	50	71	67	33	18
2013	n/a	56	51	23	10
Jumlah	149	162	160	78	39

*Sumber: BPS Yogyakarta*

Jumlah ini apabila dibandingkan dengan empat wilayah lain di Yogyakarta adalah yang paling kecil. Namun jumlah kebakaran yang kecil ini bukan lantas mengabaikan urgensi dinas pemadam kebakaran di Kabupaten Kulon Progo, karena merujuk pada sejarah pendirian korps brandweer di Batavia, ketidaksiapan pemerintah untuk menangani kebakaran itu justru akan merugikan perekonomian wilayah tersebut. Merujuk pula pada PERMENPU No. 20 Th.

2009, kantor dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo yang masih bernaung di bawah BPBD Kabupaten Kulon Progo, masih harus menyesuaikan standar-standar pemerintah mengenai fasilitas bangunan (kantor) pemadam kebakaran.

### **3.2 Lokasi dan Tapak**

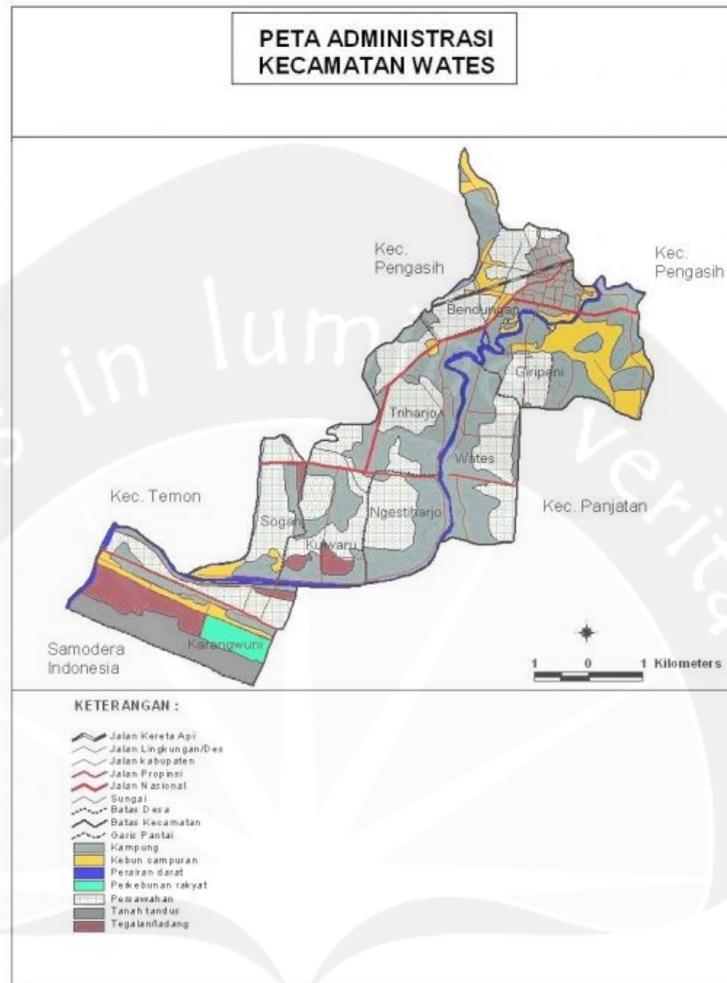
Penentuan Lokasi:

Sebagai sebuah bangunan yang mewadahi fungsi Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) dan Pusat Pendidikan Kebakaran (PUSLATKAR) di Kabupaten Kulon Progo, bangunan ini harus terletak di lokasi yang menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan tingkatan WMK yang secara hirarkhi menjadi pusat pelayanan kabupaten/kota. Untuk penentuan lokasi yang menjadi pusat pelayanan di seluruh kabupaten, Pemkab Kulon Progo telah membagi wilayah Kabupaten Kulon Progo menjadi beberapa hirarkhi. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo seperti yang diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah tahun 2003-2013, sesuai dengan hirarkhinya, kota-kota di Kabupaten Kulon Progo dijelaskan sebagai berikut :

Hirarkhi I, adalah kota Wates meliputi sebagian kecamatan Wates dan sebagian kecamatan Pengasih sebagai pusat kegiatan yang melayani seluruh wilayah Kabupaten yang berada di bawahnya.

Hirarkhi II, terdiri dari kota Temon, Sentolo, Nanggulan, Brosot, dan Dekso, direncanakan sebagai pusat kegiatan tingkat II yang melayani wilayah kecamatan yang bersangkutan dan wilayah sekitarnya.

Hirarkhi III, terdiri dari kota Lendah, Kokap, Panjatan, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang. Diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (wilayah kecamatan) yang melayani daerah sendiri.



**Gambar 3.5 Peta Administrasi Kecamatan Wates**

Sumber: <http://bpmppt.kulonprogokab.go.id/> diunduh pada Mei 2015

**Lokasi Terpilih:**

Dengan paparan data sebelumnya maka lokasi yang dipilih adalah Kota Wates, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Memiliki letak yang strategis karena terletak di jalur yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah.
2. Merupakan pusat pemerintahan yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo (menjadi bagian dari Hirarkhi I).

### Kriteria Tapak:

Setelah mendapatkan lokasi yang telah ditentukan maka akan ditentukan lokasi tapak yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan proyek ini nantinya, namun sebelum menetapkan tapak yang akan ditetapkan, ada beberapa kriteria yang dijadikan acuan dalam penentuan lokasi site yang dipilih antara lain seperti berikut :

1. Lahan kosong yang cukup luas.
2. Kemudahan sirkulasi untuk mendukung aksesibilitas kendaraan pemadam kebakaran.
3. Letak yang strategis, dekat dengan area ekonomi dan gedung pemerintahan.
4. Mudah dilihat dan dicapai sehingga mudah dijangkau masyarakat.
5. Kontur lahan yang relatif datar sehingga mendukung kemudahan akses kendaraan pemadam kebakaran.

### Tapak Terpilih:

Dari kriteria tersebut maka tapak yang cocok sesuai kriteria diatas sebagai tempat dibangunnya Kantor Dinas dan Pusat Pelatihan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo berada di Desa Triharjo, yaitu di Jalan Nasional III / Jalan Magelang-Purworejo.



**Gambar 3. 6 Tapak Terpilih**

*Sumber: analisa penulis*

Site yang dipilih memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Lahan kosong yang tersedia banyak.
2. Akses yang mudah, terletak di pinggir jalan utama.  
Secara visual, tapak ini terlihat dari tepi jalan meski dengan kecepatan kendaraan yang tinggi, mengingat jalan utama di bagian depan tapak bukan termasuk jalan dengan kelokan tajam. Bentuk jalan yang lurus ini selain mendukung visibilitas bangunan juga mendukung aksesibilitas kendaraan menuju dan keluar tapak.
3. Akses yang strategis, terletak di antara wilayah pemerintahan dan industri.  
Sesuai dengan yang disyaratkan dalam PERMENPU No.20 Th. 2009 bahwa letak tapak bangunan harus menjangkau jarak waktu respon 15 menit yaitu kurang dari 7,5 km terhadap area yang dilindungi.
4. Kontur lahan relatif datar untuk pertimbangan keamanan dan kemudahan sirkulasi.